

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor Penyebab seseorang membuat akta perjanjian kawin yaitu:

Menjamin keamanan dan kepentingan usaha/Masing-masing Pihak memiliki Usaha Sendiri; Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga; Melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami; Menjamin kondisi finansial Anda setelah perkawinan putus atau berakhir; Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat; Bilamana terdapat jumlah harta kekayaan yang berbeda antara calon kedua mempelai; Apabila masing-masing pihak memiliki hutang sendiri-sendiri, pada saat sebelum dilaksanakannya perkawinan, maka dengan dibuatnya perjanjian kawin ini Pihak yang lainnya akan terbebas dari kewajiban pembayaran hutang dari pasangannya; Kedua belah pihak ini mengkhawatirkan akan adanya risiko dari perilaku suami-istri selama perkawinan terhadap harta bersama mereka; Kedua belah pihak tidak ingin adanya konflik di kemudian hari bilamana terjadi perceraian dan salah satu pihak menuntut pembagian harta.

2. Proses dari pembuatan akta perjanjian kawin mengenai harta sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu: Dengan adanya Putusan MK 69/2015, maka ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan berubah menjadi sebagai berikut: Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut; Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan; Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan; Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

3. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Perjanjian Kawin dapat dibuat pada waktu sebelum, saat dan sesudah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian itu hanya bisa diubah apabila ada kesepakatan didalam perjanjian itu untuk boleh mengubahnya. Dan setiap perubahannya juga harus dilakukan dalam bentuk akta yang sama. setelah dibuat akta perjanjian kawin pada Notaris maka harus di daftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan tempat dimana perkawinan para pihak terdaftar.

B. Saran

1. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi menyeluruh kepada setiap elemen masyarakat bahwa konsep Perjanjian Kawin dapat dibuat sebelum, pada saat dan setelah prosesi perkawinan berlangsung agar tercapai pemahaman hukum yang baik di masyarakat.

2. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut, diharapkan Pemerintah dapat sesegera mungkin membuat aturan pelaksanaannya agar tidak terjadi kekaburan hukum dimasyarakat terkait hal ini.

